

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PULAU BINTAN SEBAGAI FREE TRADE ZONE (FTZ) TERHADAP INVESTASI DI BINTAN

Raja Hardiansyah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan, Tanjungpinang

email: rajahardiansyah@yahoo.co.id

Abstract

This research aims to identify and analyze the implementation of pricing policies in Bintan Island as Zone Free Trade Zone, the investment on the island of Bintan, and the impact of policies in Bintan Island as the Free Trade Zone on the investment in the area of Bintan. The design used is an explanatory research on 48 respondents representing 48 companies. Data collecting used primary data by questionnaire. The method used to test the hypothesis is path analysis. The results through descriptive analysis shows that the implementation of policies Bintan Island as the free trade zone based on the average value of the overall fall into the category of 134.5 is not appropriate because it is in the range between 124.8 to 163.1. From the regression analysis, the variation of changes in the value of increased investment (Y) can be explained by the simultaneous communication variables (X1), resources (X2), disposition or attitude of implementers (X3), and the structure of the bureaucracy (X4) are 52.90%, while the remaining 48.10% is explained by other factors that are not included in the model. The results of the study by t-test analysis showed that the four independent variables significantly influence the dependent variable, while the F-test shows the four independent variables simultaneously significant effect on the dependent variable.

Keywords: free trade zone; policy implementation; investment

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Pulau Bintan sebagai Free Trade Zone, investasi di Pulau Bintan dan dampak kebijakan penetapan Pulau Bintan sebagai kawasan Free Trade Zone terhadap investasi di Kawasan Bintan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian penjelasan (explanatory research) pada 48 orang responden yang mewakili 48 perusahaan. Teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis ialah analisis jalur. Hasil penelitian melalui analisis deskriptif menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penetapan Pulau Bintan sebagai kawasan free trade zone berdasarkan nilai rata-rata keseluruhan termasuk ke dalam kategori kurang sesuai yaitu sebesar 134,5 karena termasuk dalam rentang antara 124,8 – 163,1. Dari analisis regresi, variasi perubahan nilai peningkatan investasi (Y) mampu dijelaskan secara serentak oleh variabel-variabel komunikasi (X1), sumber daya (X2), disposisi atau sikap pelaksana (X3), dan struktur birokrasi (X4) sebesar 52,90%, sedangkan sisanya sebesar 48,10% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam model. Hasil penelitian melalui analisis uji-t menunjukkan bahwa keempat variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat peningkatan investasi, sedangkan dari uji-f menunjukkan keempat variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat peningkatan investasi.

Kata kunci : implementasi kebijakan; investasi; zona perdagangan bebas

Detail Artikel :

Diterima : 30 Agustus 2016

Disetujui : 14 September 2016

DOI : <http://dx.doi.org/10.22216/jbe.v1i3.882>

PENDAHULUAN

Ditetapkannya Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) yang secara resmi sebagai kawasan *Free Trade Zone* (FTZ) Provinsi Kepulauan Riau melalui Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas akan memberikan peluang kepada kawasan tersebut untuk dapat berkembang lebih maju. Untuk *Free Trade Zone* (FTZ) kawasan Bintan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 yang mengatur tentang luas wilayah FTZ Bintan adalah 61.000 Ha dengan lokasi yang meliputi sebagian dari Wilayah Bintan, serta Seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim dan Pulau Lobam selain itu juga meliputi Wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompok Darat. Jenis-jenis usaha yang dikembangkan adalah Industri, *Tourism, Fisheries, Agriculture dan Mining*.

Dalam rangka menunjang Kawasan Bintan sebagai kawasan perdagangan bebas, kelembagaan di wilayah Bintan ditetapkan langsung oleh Presiden. Salah satu Ketetapan Presiden itu adalah membentuk Dewan Kawasan Bintan. Dewan terdiri atas Ketua (Gubernur Propinsi Kepulauan Riau) dan anggotanya antara lain Bupati Bintan dan Walikota Tanjungpinang. Tugas dan wewenang Dewan Kawasan Bintan adalah menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan Kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Bintan.

Dewan Kawasan Bintan selanjutnya membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Bintan (BPKB). Badan ini mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Bintan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan Bintan.

Untuk memperlancar kegiatan dikawasan Bintan, BPKB diberi wewenang untuk mengeluarkan izin-izin usaha dan izin lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usahanya dikawasan Bintan. Saat ini izin usaha untuk sektor jasa dan perdagangan mencapai 48 (Empat puluh delapan) perusahaan dengan rencana investasi sebesar US \$ 540.577.721 tetapi baru teralisasi sebesar US \$ 395.051.466 dengan menyerap tenaga kerja sebesar 9678 orang dengan rincian 9374 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan 304 Tenaga Kerja Asing (TKA).

Dari tahun 2007- 2015, kegiatan perekonomian di kawasan Bintan belum terlihat peningkatan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Terdapat sejumlah kendala atau permasalahan yang menyebabkan pengembangan kawasan Bintan agak terhambat. Untuk mengantisipasi keterlambatan itu maka telah diangkat Tim Khusus oleh Gubernur (selaku Dewan Kawasan Bintan). Berdasarkan laporan dari Tim Khusus tersebut diketahui beberapa permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan lambatnya perkembangan Bintan tersebut adalah:

1. Masalah Kelembagaan, yaitu terdapatnya dualisme kekuasaan dalam pelaksanaan di kawasan Bintan, yaitu antara pemerintah daerah Bintan dengan Badan Pengusahaan Kawasan Bintan.
2. Masalah Anggaran, yaitu belum tersedianya anggaran khusus untuk pengembangan Kawasan Bintan dari Pemerintah Pusat dan hanya mengandalkan APBD Pemerintah Daerah Bintan.
3. Bidang Infrastruktur, yaitu master plan pengembangan Kawasan Bintan belum disusun secara komprehensif.
4. Bidang hukum, yaitu belum dibuatnya petunjuk pelaksanaan undang-undang Nomor. 44 Tahun 2007, sehingga menyebabkan banyak berbagai tafsiran terhadap pelaksanaan UU No. 44 tahun 2007 terutama dibidang perizinan, ekspor, impor dan pabean.

Masalah di atas membuat pertumbuhan investasi di Bintan belum mengalami perkembangan yang cukup berarti. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan. Investasi dapat juga digunakan untuk mendorong laju pertumbuhan perekonomian pada sektor tertentu. Bintan sebagai daerah yang selama ini menjadi daerah tempat investasi dari manapun datang, memerlukan kebijakan yang kondusif untuk investasi, karena selama ini pembangunan sektor riil belum pada tingkat yang tertinggi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendapatan perkapita, pertumbuhan sektoral yang rendah dan lain-lain. Dengan berkembangnya investasi di Bintan, diharapkan masyarakat Bintan dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat kebijakan penetapan Pulau Bintan sebagai Kawasan FTZ (*Free Trade Zone*) yang telah berjalan selama 7 (tujuh) tahun belum menunjukkan kinerja yang baik serta dalam rangka memaksimalkan keberhasilan atas penerapan kebijakan Kawasan FTZ (*Free Trade Zone*) Bintan, perlu kiranya dilakukan suatu penelitian yang dapat menemukan cara pemecahan terhadap permasalahan di atas.

Implementasi Kebijakan adalah suatu proses pelaksanaan atas berbagai bentuk kebijakan yang dicanangkan oleh negara atau pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, yang berguna bagi kepentingan publik. Dalam kaitan ini Dunn, menyatakan bahwa:

"Policy implementation includes the execution and steering of laws of action over time. Policy implementation is essentially a practical activity, as distinguished from policy formulation, which is essentially theoretical"

Pelaksanaan kebijakan menurut William Dunn tersebut lebih bersifat kegiatan praktis termasuk didalamnya melaksanakan eksekusi serta mengarahkan. Pengarahan kebijakan merupakan satu bagian yang sangat penting dalam suatu proses kebijakan. Setiap kebijakan dalam prakteknya sering memunculkan masalah di lapangan karena umumnya kebijakan yang dirumuskan tidak sesuai dengan masalah yang ada.

Menurut Grindle, keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks penerapan kebijakan (*context of implementation*). Secara khusus Edward III mengemukakan adanya empat dimensi kritis yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

1) *Communication* (Komunikasi)

Implementasi kebijakan akan lebih efektif jika orang-orang yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan memahami apa yang seharusnya mereka lakukan. Kebijakan-kebijakan yang harus diimplementasikan disalurkan melalui orang-orang yang tepat, dan komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat, dan konsisten.

2) *Resources* (Sumber daya)

Kejelasan, konsistensi, dan akurasi komunikasi tidak akan mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan jika sumber daya alam untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut tidak memadai. Sumber daya dalam implementasi kebijakan tidak hanya mencakup sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya material. Tanpa sumber daya yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif.

3) *Disposition* (Disposisi atau Sikap)

Implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh seberapa jauh pelaksana kebijakan mengetahui isi kebijakan dan kemampuan untuk melaksanakannya, tetapi juga ditentukan oleh keinginan atau tekad para pelaksana dalam menerapkan kebijakan.

4) *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

Struktur birokrasi merupakan variabel terakhir yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Implementasi melibatkan banyak pihak, sehingga koordinasi dan kerjasama dari masing-masing pihak menjadi lebih penting. Dalam hubungan ini,

setiap pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan perlu mengembangkan suatu *standar operation procedure (SOP)*.

Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone*)

Istilah *Free Trade Zone (FTZ)* sebagai salah satu bentuk dari zona ekonomi (*Economic Zone*) pada umumnya memiliki pengertian yang cukup beragam. Hal ini diduga sebagai akibat adanya perbedaan dalam sudut pandang atau bobot tinjauan para ahli itu sendiri tentang konsep *Free Trade Zone* tersebut. Sedangkan zona ekonomi (*Economic zone*) menurut Capela dan Hartman, adalah “ *The economic zone is designated regions in a country that operate under rules that provide special investment incentive, including Duty Free treatment for import and manufacturing plants that reexport their Product*”.

Dan perdagangan bebas (*free trade*) adalah konsep teoritis yang mengandaikan berlakunya sistem perdagangan internasional yang dibebaskan dari hambatan yang disebabkan oleh ketentuan pemerintah suatu negara, baik yang disebabkan oleh pengenaan tarif (*tariff barriers*) maupun nir-tarif (bukan tarif/*non-tariff barriers*). Menurut Charles W. Thurston *Free Trade Zone (FTZ)* memiliki arti yaitu : “ *An free trade zone is in essence, a tax-free enclave and not considered part of the country as far as import regulations are concern. When item leaves an free trade zone and is officially imported into the host country of the free trade zone, all duties and regulation are imposed*”.¹

Investasi

Menurut Sunariyah²: “Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.” Dewasa ini banyak negara-negara yang melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik ataupun modal asing. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan mendorong pula kegiatan ekonomi suatu negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksplanatori. Peneliti menggunakan metode ini karena peneliti bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaruh antar satu variabel terhadap variabel lainnya yang meliputi analisis implementasi kebijakan penetapan Pulau Bintan sebagai kawasan *Free Trade Zone (X)* terhadap peningkatan investasi (Y) melalui pengujian hipotesis.

Penggunaan metode ini dirinci dalam operasionalisasi variabel yang difokuskan pada indikator sehingga dapat memadai untuk dijadikan rancangan pada model pengujian statistik dengan menggunakan *path analysis*.

Setiap variabel dijabarkan dalam dimensi-dimensi yang selanjutnya dimensi-dimensi tersebut dijabarkan lagi dalam indikator-indikator seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 1.
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Kebijakan penetapan Pulau Bintan sebagai Kawasan <i>Free Trade Zone (X)</i>	1. Komunikasi	1. Penyampaian kebijakan 2. Kejelasan kebijakan 3. Konsistensi kebijakan

	2. Sumber Daya	1. Staf pelaksana kebijakan 2. Implementasi kebijakan 3. Kewenangan pelaksana kebijakan 4. Fasilitas pelaksana kebijakan
	3. Disposisi atau Sikap pelaksana	1. Pengaruh disposisi pelaksana kebijakan 2. Penyusunan staf pelaksanaan kebijakan 3. Insentif pelaksana kebijakan
	4. Struktur Birokrasi	1. Prosedur operasi standar data kebijakan 2. Pembagian Tugas data kebijakan
Peningkatan investasi (Y)		1. Data investasi di Kawasan Free Trade Zone Bintan Tahun 2007 – 2015

Metode analisis data diarahkan untuk menjawab masalah penelitian yang telah diidentifikasi dengan menguji hipotesis yang diajukan, kemudian dibahas secara mendalam untuk menggambarkan fenomena atau kasus yang dikaji dalam penelitian ini. Berdasarkan identifikasi masalah dan hipotesis yang diajukan, maka metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Sebelum data hasil kuesioner yang memiliki skala pengukuran ordinal dianalisis dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*), harus dilakukan transformasi data terlebih dahulu agar data memiliki skala pengukuran interval, karena salah satu asumsi yang harus dipenuhi pada saat data akan dianalisis dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*) adalah data sekurang-kurangnya memiliki skala pengukuran interval. Metode yang digunakan untuk melakukan transformasi data adalah *Succesive Intervals Methods*, dengan langkah kerja sebagai berikut:

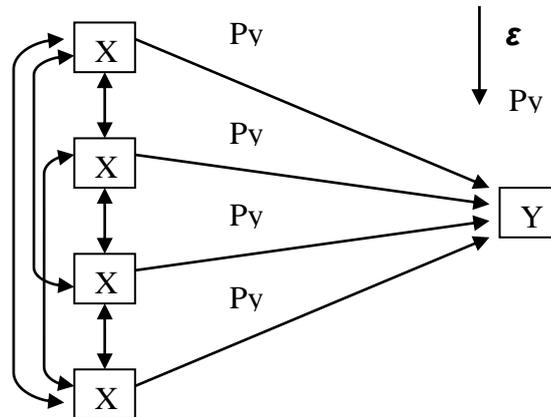
- (1) Menganalisis setiap item pernyataan/pertanyaan.
- (2) Menghitung frekuensi (f) responden yang memperoleh skor.
- (3) Menghitung proporsi (p) dengan membagi setiap frekuensi dengan banyaknya responden.
- (4) Menghitung proporsi kumulatif (pk).
- (5) Menghitung nilai Z setiap proporsi kumulatif yang diperoleh, dengan menggunakan tabel Z.
- (6) Menentukan nilai densitas untuk setiap nilai Z yang diperoleh.
- (7) Menentukan nilai skala (*scale value*), dengan perumusan sebagai berikut:

$$Scale\ Value = \frac{Density\ at\ lower\ limit - Density\ at\ upper\ limit}{Area\ below\ upper\ limit - Area\ below\ lower\ limit}$$

- (8) Menentukan nilai transformasi, dengan rumus:

$$Y = SV + [k] \text{ Dimana } k = 1 + [Sv_{min}]$$

Paradigma penelitian sebagai berikut:



Dari paradigma penelitian itu dapat diukur besarnya pengaruh X ke Y menggunakan rumus *Path Analysis* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan data yang ada, hitung koefisien korelasi sederhana dengan menggunakan rumus:

$$r_{X_iX_j} = \frac{n \sum_{h=1}^n X_{ih} X_{jh} - \sum_{h=1}^n X_{ih} \sum_{h=1}^n X_{jh}}{\sqrt{\left[n \sum_{h=1}^n X_{ih}^2 - \left(\sum_{h=1}^n X_{ih} \right)^2 \right] \left[n \sum_{h=1}^n X_{jh}^2 - \left(\sum_{h=1}^n X_{jh} \right)^2 \right]}} \quad i \neq j = 1, 2, \dots, k$$

Buat harga koefisien korelasi antar variabel dalam sebuah matriks korelasi yang bentuknya:

$$\begin{matrix} X_1 & X_2 & & X_k \\ \left| \begin{array}{cccc} r_{X_1X_1} & r_{X_1X_2} & \dots & r_{X_1X_k} \\ & r_{X_2X_2} & \dots & r_{X_2X_k} \\ & & & \\ & & & r_{X_kX_k} \end{array} \right| \end{matrix}$$

- (2) Hitung matriks invers korelasinya, yaitu:

$$\begin{matrix} X_1 & X_2 & & X_k \\ \left| \begin{array}{cccc} CR_{11} & CR_{12} & \dots & CR_{1k} \\ & CR_{22} & \dots & CR_{2k} \\ & & & \\ & & & CR_{kk} \end{array} \right| \end{matrix}$$

- (3) Hitung koefisien jalur dengan:

$$p_{YX_i} = \sum_{j=1}^k CR_{ij} r_{YX_j} \quad ; \quad i = 1, 2, \dots, k$$

Untuk menghitung pengaruh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model, maka digunakan rumus:

$$p_Y \varepsilon = \sqrt{1 - R_{YX_1 \dots X_k}^2}$$

Dalam hal ini;

$$R_{YX_1 \dots X_k}^2 = \sum_{i=1}^k p_{YX_i}^2$$

Sedangkan;

$R_{YX_1 \dots X_k}^2$ merupakan koefisien yang menyatakan determinasi total dari semua variabel penyebab terhadap akibat.

Setelah diperoleh besarnya pengaruh X terhadap Y , selanjutnya dilakukan pengujian terhadap koefisien jalur. Apabila diagram jalur yang diperoleh merupakan gambaran dari regresi linier multipel, maka pengujian mengenai koefisien jalur ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

(1) Pengujian secara keseluruhan.

Hipotesis pada pengujian secara keseluruhan ini adalah:

$$H_0: p_{YX_1} = p_{YX_2} = \dots = p_{YX_k} = 0$$

$$H_1: p_{YX_i} \neq 0$$

Dengan rumus pengujian sebagai berikut;

$$F = \frac{(n - k - 1) \sum_{i=1}^k p_{YX_i}^2}{k (1 - \sum_{i=1}^k p_{YX_i}^2)}$$

Statistik uji di atas mengikuti distribusi F -Snedecor dengan derajat bebas

$$v_1 = k \text{ dan } v_2 = n - k - 1$$

(2) Pengujian secara individual

Apabila pada pengujian secara keseluruhan H_0 ditolak, artinya sekurang-kurangnya ada sebuah $p_{YX_i} \neq 0$. Untuk mengetahui p_{YX_i} mana yang sama dengan nol, atau untuk menguji hipotesis konseptual yang diajukan, maka dilakukan pengujian secara individual.

Hipotesis pada pengujian secara individual ini adalah:

$$H_0: p_{YX_i} \leq 0 \text{ melawan } H_1: p_{YX_i} > 0$$

Dengan rumus pengujian sebagai berikut:

$$t_i = \frac{p_{YX_i}}{\sqrt{\frac{(1 - R_{YX_1 \dots X_k}^2) CR_{ij}}{n - k - 1}}}; i = 1, 2, \dots, k$$

statistik uji di atas mengikuti distribusi t dengan derajat bebas $n - k - 1$.

Berikut ini adalah data perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi di wilayah FTZ Bintan selama tahun 2015.

Tabel 2.
Realisasi Investasi di FTZ Bintan (dalam US\$)

No	Perusahaan	Jumlah
1	PT. Yoshikawa Electronic Bintan	25,307,000
2	PT. Honeywell Industries Indonesia	13,564,000
3	PT. Gp.Technology Bintan	1,131,000
4	PT. Cci Bintan	2,500,000
5	PT. Mac Fauna	1,000,000
6	PT. Centrotec Jit Bintan	140,000
7	PT. Biie Lobam	114,528,000
8	PT. Bintan Lagoon Resort	37,500,000
9	PT. Ria Bintan	69,977,758
10	PT. Bintan Bersatu Apparel	300,000
11	PT. Esco Bintan Indonesia	3,765,850
12	PT. Pelangi Bintan Indah	21,703,379
13	PT. Pertama Pricision Bintan	1,150,000
14	PT. Rin Food & Beverages Sevices	380,000
15	PT. Bukit Lagoi Villa	30,000,000
16	PT.Pepperl And Fuchs Bintan	10,733,048
17	PT. Bintan Resort Cakrawala	45,997,758
18	PT. Amc Bintan	1,833,000
19	PT. Esco Village	468,000
20	PT. Tropical Air Line	7,808,605
21	PT. Heritage Resort & Spa	1,000,000
22	PT. Bintan Living	100,000
23	PT. Bintan Foods	7,500,000
24	PT. Sebong Batu Berdaun	200,000
25	PT.Buana Mega Wisata	175,000
26	PT. Bintan Hotel Utama	292,556
27	PT. Eresindo Bintan Adhika	5,400,000
28	PT. Add Plus Technologies Indonesia	1,000,000
29	PT. Bintan Leisure Resort Ventures	168,843
30	PT. Bintan Sinar Makmur	374,829
31	PT. Tropical Bay	46,500
32	PT. Gimmil Industrial Bay	3,245,000
33	PT. Bintan Offshore	2,000,000
34	PT. Kijang Indah Lestari	2,750,000
35	PT. Inocin Abadi	81,356
36	PT. Pelangi Bintan Indah	250,000
37	PT. Management Bayan Tree Resort & Spa	1,550,078
38	PT. Tenaga Listrik Bintan	1,000,000
39	PT. Avc Indonesia	100,000
40	PT. Smart Corporation Bintan	1,250,000
41	PT. Korindo Abadi	14,125,000
42	PT. Taching-Bintan/ PT. Bintan Marina Technology	5,000,000
43	PT Pesona Alam Semesta	3,441,234
44	PT. Stareast Sejahtera Group	2,633,333
45	PT. Bintan Treasure Bay	300,000
46	PT. Lingga Island Tourism	290,000
47	PT. Prime Villa Investment	58,090
48	PT. Hillway Indonesia	46,500

Sumber: Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, 2015

Berdasarkan pengolahan menggunakan SPSS diperoleh struktur jalur hubungan antara kebijakan penetapan Pulau Bintan sebagai kawasan *free trade zone* dengan investasi di kawasan Bintan sebagai berikut:

$$Y = -53549918,23 + 1968304,74 X_1 + 1694367,88 X_2 + 2320782,64 X_3 + 2620310,17 X_4$$

$$SE (9680072,90) \quad (824850,91) \quad (725070,79) \quad (1137050,84) \quad (1050722,54)$$

$$t\text{-stat } (-5,53)^* \quad (2,38)^* \quad (2,33)^* \quad (2,04)^* \quad (2,49)^*$$

$$R^2 = 0,5288$$

$$F\text{-stat} = 12,06$$

$$n = 48$$

$$df = 43$$

Dimana t-tabel (0,05 ; 43) = 1,684

* Signifikan pada level 5%

Hasil estimasi di atas dapat dijelaskan pengaruh variabel eksogenus kebijakan penetapan Pulau Bintan sebagai kawasan *free trade zone* terhadap investasi di kawasan Bintan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi (X_1)

Komunikasi (X_1) memiliki pengaruh positif terhadap investasi di kawasan Bintan dengan koefisien sebesar 1968304,74. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan komunikasi sebesar 1 satuan akan menyebabkan kenaikan investasi di kawasan Bintan sebesar \$ 1968304,74.

2. Sumber Daya (X_2)

Sumber daya (X_2) memiliki pengaruh positif terhadap investasi di kawasan Bintan dengan koefisien sebesar 1694367,88. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan sumber daya sebesar 1 satuan akan menyebabkan kenaikan investasi di kawasan Bintan sebesar \$ 1694367,88.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana (X_3)

Disposisi atau sikap pelaksana (X_3) memiliki pengaruh positif terhadap investasi di kawasan Bintan dengan koefisien sebesar 2320782,64. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan disposisi atau sikap pelaksana sebesar 1 satuan akan menyebabkan kenaikan investasi di kawasan Bintan sebesar \$ 2320782,64.

4. Struktur birokrasi (X_4)

Struktur birokrasi (X_4) memiliki pengaruh positif terhadap investasi di kawasan Bintan dengan koefisien sebesar 2620310,17. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan struktur birokrasi sebesar 1 satuan akan menyebabkan kenaikan investasi di kawasan Bintan sebesar \$ 2620310,17.

Besarnya pengaruh langsung (*direct effect*) variabel komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi terhadap investasi di kawasan Bintan adalah sebagai berikut:

$$Pyx_1 ; X_1 \rightarrow Y = 1968304,74$$

$$Pyx_2 ; X_2 \rightarrow Y = 1694367,88$$

$$Pyx_3 ; X_3 \rightarrow Y = 2320782,64$$

$$Pyx_4 ; X_4 \rightarrow Y = 2620310,17$$

Besarnya korelasi antar variabel eksogenus yaitu variabel komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi adalah sebagai berikut:

$$r_{X_1X_2}; X_1 \rightarrow X_2 = 0,220813$$

$$r_{X_1X_3}; X_1 \rightarrow X_3 = 0,254247$$

$$r_{X_1X_4}; X_1 \rightarrow X_4 = 0,303169$$

$$r_{X_2X_3}; X_2 \rightarrow X_3 = 0,225555$$

$$r_{X_2X_4}; X_2 \rightarrow X_4 = 0,361350$$

$$r_{X_3X_4}; X_3 \rightarrow X_4 = 0,344201$$

Selanjutnya besarnya pengaruh tidak langsung / *indirect effect* adalah sebagai berikut:

- a. Pengaruh variabel X_1 (komunikasi) terhadap Y (investasi) melalui X_2 (sumber daya) diformulasikan dengan model sebagai berikut:

$$X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow Y$$

$$= (r_{X_2X_1}) (PYX_2)$$

$$= (0,220813) (1694367,88)$$

$$= 374138,45$$

Komunikasi (X_1) melalui sumber daya (X_2) memiliki pengaruh positif terhadap investasi di kawasan Bintan (Y) dengan koefisien sebesar 374138,45. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan pada komunikasi sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan kenaikan investasi di kawasan Bintan sebesar \$ 374138,45.

- b. Pengaruh variabel X_1 (komunikasi) terhadap Y (investasi) melalui X_3 (disposisi atau sikap pelaksana) diformulasikan dengan model sebagai berikut:

$$X_1 \rightarrow X_3 \rightarrow Y$$

$$= (r_{X_3X_1}) (PYX_3)$$

$$= (0,254247) (2320782,64)$$

$$= 590052,02$$

Komunikasi (X_1) melalui disposisi atau sikap pelaksana (X_3) memiliki pengaruh positif terhadap investasi di kawasan Bintan (Y) dengan koefisien sebesar 590052,02. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan pada komunikasi sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan kenaikan investasi di kawasan Bintan sebesar \$ 590052,02.

- c. Pengaruh variabel X_1 (komunikasi) terhadap Y (investasi) melalui X_4 (struktur birokrasi) diformulasikan dengan model sebagai berikut:

$$X_1 \rightarrow X_4 \rightarrow Y$$

$$= (r_{X_4X_1}) (PYX_4)$$

$$= (0,303169) (2620310,17)$$

$$= 794396,81$$

Komunikasi (X_1) melalui struktur birokrasi (X_4) memiliki pengaruh positif terhadap investasi di kawasan Bintan (Y) dengan koefisien sebesar 794396,81. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan pada komunikasi sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan kenaikan investasi di kawasan Bintan sebesar \$ 794396,81.

- d. Pengaruh variabel X_2 (sumber daya) terhadap Y (investasi) melalui X_3 (disposisi atau sikap pelaksana) diformulasikan dengan model sebagai berikut:

$$X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow Y$$

$$= (r_{X_3X_2}) (PYX_3)$$

$$= (0,225555) (2320782,64)$$

$$= 523464,13$$

Sumber daya (X_2) melalui disposisi atau sikap pelaksana (X_3) memiliki pengaruh positif terhadap investasi di kawasan Bintan (Y) dengan koefisien sebesar 523464,13. Hal ini

berarti bahwa jika terjadi kenaikan pada sumber daya sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan kenaikan investasi di kawasan Bintan sebesar \$ 523464,13.

- e. Pengaruh variabel X_2 (sumber daya) terhadap Y (investasi) melalui X_4 (struktur birokrasi) diformulasikan dengan model sebagai berikut:

$$\begin{aligned} X_2 \rightarrow X_4 \rightarrow Y \\ &= (r_{X_4 X_2}) (PYX_4) \\ &= (0,361350)(2620310,17) \\ &= 946849,08 \end{aligned}$$

Sumber daya (X_2) melalui struktur birokrasi (X_4) memiliki pengaruh positif terhadap investasi di kawasan Bintan (Y) dengan koefisien sebesar 946849,08. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan pada sumber daya sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan kenaikan investasi di kawasan Bintan sebesar \$ 946849,08.

- f. Pengaruh variabel X_3 (disposisi atau sikap pelaksana) terhadap Y (investasi) melalui X_4 (struktur birokrasi) diformulasikan dengan model sebagai berikut:

$$\begin{aligned} X_3 \rightarrow X_4 \rightarrow Y \\ &= (r_{X_4 X_3}) (PYX_4) \\ &= (0,344201) (2620310,17) \\ &= 901913,38 \end{aligned}$$

Disposisi atau sikap pelaksana (X_3) melalui struktur birokrasi (X_4) memiliki pengaruh positif terhadap investasi di kawasan Bintan (Y) dengan koefisien sebesar 901913,38. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan pada disposisi atau sikap pelaksana sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan kenaikan investasi di kawasan Bintan sebesar \$ 901913,38.

Kemudian besarnya pengaruh total / *total effect* adalah sebagai berikut:

- a. Total pengaruh variabel X_1 (komunikasi) terhadap Y (investasi) melalui X_2 (sumber daya) diformulasikan dengan model sebagai berikut:

$$\begin{aligned} X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow Y \\ &= (r_{X_2 X_1}) + (PYX_2) \\ &= (0,220813) + (1694367,88) \\ &= 1694368,10 \end{aligned}$$

Komunikasi (X_1) dan sumber daya (X_2) secara total memiliki hubungan positif terhadap investasi di kawasan Bintan (Y) dengan koefisien sebesar 1694368,10. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan pada komunikasi sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan kenaikan investasi di kawasan Bintan sebesar \$ 1694368,10.

- b. Total pengaruh variabel X_1 (komunikasi) terhadap Y (investasi) melalui X_3 (disposisi atau sikap pelaksana) diformulasikan dengan model sebagai berikut:

$$\begin{aligned} X_1 \rightarrow X_3 \rightarrow Y \\ &= (r_{X_3 X_1}) + (PYX_3) \\ &= (0,254247) + (2320782,64) \\ &= 2320782,89 \end{aligned}$$

Komunikasi (X_1) dan disposisi atau sikap pelaksana (X_3) secara total memiliki hubungan positif terhadap investasi di kawasan Bintan (Y) dengan koefisien sebesar 2320782,89. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan pada komunikasi sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan kenaikan investasi di kawasan Bintan sebesar \$ 2320782,89.

- c. Total pengaruh variabel X_1 (komunikasi) terhadap Y (investasi) melalui X_4 (struktur birokrasi) diformulasikan dengan model sebagai berikut:

$$\begin{aligned} X_1 \rightarrow X_4 \rightarrow Y \\ &= (r_{X_4 X_1}) + (PYX_4) \end{aligned}$$

$$= (0,303169)+(2620310,17)$$

$$= 2620310,47$$

Komunikasi (X_1) dan struktur birokrasi (X_4) secara total memiliki hubungan positif terhadap investasi di kawasan Bintan (Y) dengan koefisien sebesar 2620310,47. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan pada komunikasi sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan kenaikan investasi di kawasan Bintan sebesar \$ 2620310,47.

- d. Total pengaruh variabel X_2 (sumber daya) terhadap Y (investasi) melalui X_3 (disposisi atau sikap pelaksana) diformulasikan dengan model sebagai berikut:

$$X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow Y$$

$$= (r_{X_3 X_2}) + (P Y X_3)$$

$$= (0,225555) + (2320782,64)$$

$$= 2320782,87$$

Sumber daya (X_2) dan disposisi atau sikap pelaksana (X_3) secara total memiliki hubungan positif terhadap investasi di kawasan Bintan (Y) dengan koefisien sebesar 2320782,87. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan pada sumber daya sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan kenaikan investasi di kawasan Bintan sebesar \$ 2320782,87.

- e. Total pengaruh variabel X_2 (sumber daya) terhadap Y (investasi) melalui X_4 (struktur birokrasi) diformulasikan dengan model sebagai berikut:

$$X_2 \rightarrow X_4 \rightarrow Y$$

$$= (r_{X_4 X_2}) + (P Y X_4)$$

$$= (0,361350) + (2620310,17)$$

$$= 2620310,53$$

Sumber daya (X_2) dan struktur birokrasi (X_4) secara total memiliki hubungan positif terhadap investasi di kawasan Bintan (Y) dengan koefisien sebesar 2620310,53. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan pada sumber daya sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan kenaikan investasi di kawasan Bintan sebesar \$ 2620310,53.

- f. Total pengaruh variabel X_3 (disposisi atau sikap pelaksana) terhadap Y (investasi) melalui X_4 (struktur birokrasi) diformulasikan dengan model sebagai berikut:

$$X_3 \rightarrow X_4 \rightarrow Y$$

$$= (r_{X_4 X_3}) + (P Y X_4)$$

$$= (0,344201) + (2620310,17)$$

$$= 2620310,51$$

Disposisi atau sikap pelaksana (X_3) dan struktur birokrasi (X_4) secara total memiliki hubungan positif terhadap investasi di kawasan Bintan (Y) dengan koefisien sebesar 2620310,51. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan pada disposisi atau sikap pelaksana sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan kenaikan investasi di kawasan Bintan sebesar \$ 2620310,51.

Nilai $R^2 = 0,5288$ menandakan bahwa variasi dari perubahan nilai peningkatan investasi (Y) mampu dijelaskan secara serentak oleh variabel-variabel komunikasi (X_1), sumber daya (X_2) dan disposisi atau sikap pelaksana (X_3), dan struktur birokrasi (X_4) sebesar 52,88%, sedangkan sisanya sebesar 47,12% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam model.

Analisis selanjutnya, semua variabel yang ditempatkan dalam model, yakni : Y (peningkatan investasi), komunikasi (X_1), sumber daya (X_2), disposisi atau sikap pelaksana (X_3), dan struktur birokrasi (X_4) perlu diinterpretasi apakah sesuai dengan kriteria ekonomi. Selanjutnya lakukan pengujian secara parsial untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan masing-masing koefisien regresi secara sendiri terhadap variabel dependen (Y).

Dari ke-4 variabel bebas tersebut, ke-4 variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Hal ini ditandai bahwa t-stat untuk koefisien regresi masing-masing variabel bebas tampak lebih besar dibandingkan t-tabel pada level 5% dan *degree of freedom* sebesar 43. Untuk variabel X_1 t-stat = 2,38 > t-tabel (0,05 ; 43) = 1,684. Kemudian X_2 t-stat = 2,33 > t-tabel (0,05 ; 43) = 1,684, X_3 t-stat = 2,04 > t-tabel (0,05 ; 43) = 1,684, dan X_4 t-stat = 2,49 > t-tabel (0,05 ; 43) = 1,684.

Selanjutnya, pengujian secara serentak/bersama-sama, ada tidaknya pengaruh yang signifikan secara bersama-sama, pengujian ini melibatkan keempat variabel (X_1 , X_2 , X_3 dan X_4) terhadap variabel Y. Pengujian secara serentak menggunakan distribusi F yaitu membandingkan antara F-stat dengan F-tabel. Hasil melalui program SPSS diperoleh nilai F-stat = 12,06 > F-tabel (0,05; 4; 43) = 2,589 maka dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 secara serentak mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap perubahan variabel Y.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, khususnya pada perhitungan dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan penetapan Pulau Bintan sebagai kawasan *free trade zone* berdasarkan nilai rata-rata keseluruhan termasuk ke dalam kategori kurang sesuai yaitu sebesar 134,5 karena termasuk dalam rentang antara 124.8 – 163.1. Kebijakan penetapan Pulau Bintan sebagai kawasan *Free Trade Zone*, dapat diukur dari empat dimensi yakni; komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.
2. Jumlah keseluruhan nilai investasi perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi di wilayah FTZ Bintan selama tahun 2011 sebesar \$ 444,165,717 dengan rata-rata investasi sebesar \$ 9,253,452. Nilai investasi terbesar adalah PT. Biie Lobam sebesar \$ 114,528,000 dan nilai investasi terkecil adalah PT. Hillway Indonesia sebesar \$ 46,500.
3. Variasi perubahan nilai peningkatan investasi (Y) mampu dijelaskan secara serentak oleh variabel-variabel komunikasi (X_1), sumber daya (X_2) dan disposisi atau sikap pelaksana (X_3), dan struktur birokrasi (X_4) sebesar 52,88%, sedangkan sisanya sebesar 47,12% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam model. Berdasarkan uji t, dari ke-4 variabel bebas tersebut, ke-4 variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel Y secara parsial. Sedangkan berdasarkan uji F, secara serentak variabel X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap perubahan variabel Y.

Adapun saran atau masukan yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi peran FTZ perlu terus didorong agar cita-cita sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional menjadi kenyataan. Untuk lebih mengotimalkan peran FTZ BBK, kebijakan lanjutan adalah ; pertama adalah mengembangkan komponen barang-barang modal dengan kemampuan dalam negeri. Daya dukung sumberdaya (*endowment*) Pulau Bintan sangat besar, sumber daya alam dan manusia. Dalam jangka panjang, efek substitusi (*substitution effect*) dan efek income (*income effect*) akan terjadi akibat pengurangan komponen biaya produksi. Kedua, perlu kembangkan infrastruktur maritim dengan regulasi pendukung sehingga menunjang pelayaran dalam negeri. Ketiga, Perlu perbaikan infrastruktur darat dan pelabuhan agar konsentrasi industri di kawasan BBK menyebar. Dukungan pemerintah pusat diperlukan seluruh kawasan FTZ. Keempat, pemerintah pusat dan daerah harus makin terbuka dan profesional sehingga checklist masalah dan key strategy harus dijelaskan dengan transparan. Regulasi harus konsisten dengan perilaku birokrasi agar tercipta kepastian hukum.

2. Dengan memanfaatkan keunggulan komparatif secara optimal seperti pada sektor pertanian dan pertambangan ini, maka hal tersebut merupakan salah satu faktor utama keberhasilan pada arah pembentukan dan pengembangan sebuah zona bebas seperti FTZ ini
3. Hendaknya bila penerapan sebuah FTZ yang komprehensif dalam sebuah zona khusus yang lebih besar seperti SEZ, baiknya dengan berbasis industrialisasi manufaktur yang mengedepankan pemanfaatan pada sektor keunggulan komparatif yang sangat besar yang dimiliki oleh sebuah negara, misalnya seperti pada kebanyakan negara-negara Asia yaitu pertanian dan pertambangan

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan Wibawa, Samudra, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Grindle, and Merilee. 1980. *Politics and Policy Implementation In The Third World*. New Jersey. Princenton University Press.
- Capella and Hatman Burmansyah, Edy. "Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dalam Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil". Seri Kertas Kerja Institute For Global Justice 2009.
- Muliono, Heri. *Merajut Batam Masa Depan: Menyongsong Status Free Trade Zone*. Pustaka LP3ES Indonesia 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang : Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.
- Laporan Dewan Kawasan Kepada Presiden Republik Indonesia Tentang: Pelaksanaan Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Provinsi Kepulauan Riau.
- Ekpose Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (BAPPEDA) Propinsi Kepulauan Riau